

ABSTRAK

Renni Fitriyana (06193018) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2014. Judul Skripsi Peran Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Syaiful, M.Si dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP,M.PP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun salah satu dari aktor tersebut ialah 5 orang inisiator dari Dinas ESDM. Penelitian ini dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan ada beberapa tahap yaitu tahap identifikasi masalah, tahap agenda kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, dan tahap legitimasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Unit analisis yang digunakan adalah lembaga, data berupa primer dan sekunder serta uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data. Teknik analisa data yang digunakan adalah etik dan emik. Penelitian ini mengacu pada teori peran aktor dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan perumusan kebijakan sesuai dengan teori perumusan kebijakan oleh Thomas R.Dye telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Diketahui bahwa peranan aktor-aktor perumusan kebijakan yaitu eksekutif bersama beberapa SKPD yaitu Kesbangpollinmas, Bappeda, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perhubungan, telah berperan dalam perumusan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Sedangkan legislatif berperan sebagai pengesahan kebijakan, pembentukan anggaran dan ikut mengawasi jalannya perda. Mengenai sosialisasi kebijakan, hanya sebatas tataran birokrasi dan tidak menyentuh secara langsung ke masyarakat. Proses perumusan tidak melibatkan semua pihak. Bahkan aktor yang terlibat tidak seluruh tataran birokrasi bahkan inisiator hanya berasal dari beberapa orang saja. Dan media pun satu-satunya pihak yang mendesak untuk disahkannya Perda No.5 Tahun 2007 sesegera mungkin.

Kata kunci : peran aktor, perumusan kebijakan, peraturan daerah penanggulangan bencana.

ABSTRACT

Renni Fitriyana (06193018) Departement of Political Science, the Faculty of Social and Political Science, Andalas University, 2013. The title of the thesis is Role of Actor in Policy Formation Regional Regulation No. 5 Year 2007 About Disaster Prevention in West Sumatera. Guided by Supervisor I Drs. Syaiful, M.Si, and Supervisor II Andri Rusta, S.IP,M.PP.

This study describes role of actors who involved in policy formulation process especially *state actor* on regional regulation no.5 year 2007 about disaster prevention in West Sumatera. How the actors role in and what is their role in regional regulation formulation no.5 year 2007 about disaster prevention in West Sumatera.

This study uses qualitative descriptive type. The process of collecting data is using interviews and documentation. The selection of informants is using the purposive sampling technique. Analysis units which used is institution. Form data uses two type, primary and secondary and data validity test by triangulation data source. The data is analyzed through ethical interpretation and amice method. This study focus on theory about rele of actor in policy formulation.

This research show us that step by step policy formulation appropriate with policy formulation theory by Thomas R.Dye and all are done by local government of West Sumatera. By the theory is founded that role of actors in policy formulation are excutive and some of bureaucrat official take role in policy formulation start from planning until policy implementation, then legislative take their role as policy legitimation, budgetting formation and join to control implementation of the regional regulation. About policy socialization, just include in bureaucrat level and never touch directly to society. Formulation process doesn't involving all level of people. Government actor who join not at all bureaucrat, even initiator only derived from some people. And media is only one party which pushing down to be authorized the regional regulation no.5 year 2007 as soon as.

Keywords : actor rules, policy formulation, regional regulation about disaster prevention.